

ABSTRAK

Kesepakatan mengenai liberalisasi perdagangan dunia yang telah dicapai dalam konferensi negara-negara APEC pada tanggal 14-15 Nopember 1994 di Bogor semakin membuka mata dan menantang dunia usaha di Indonesia untuk lebih meningkatkan efisiensi di segala bidang dengan melakukan usaha dalam berbagai proses atau kegiatan agar dapat bersaing dalam pasar global. Bentuk industri yang terus berkembang adalah industri kayu lapis. Untuk menghadapi persaingan inilah badan usaha berusaha meningkatkan produktivitasnya agar dapat menghasilkan produk yang cukup kompetitif di pasar, maka badan usaha perlu melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas fungsi produksi dengan cara melakukan pengendalian atas fungsi produksi melalui pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh seorang akuntan independen. Pemeriksaan operasional ini dilakukan dengan disertai tanggung jawab untuk membantu manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya dengan merekomendasikan berbagai tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga pada akhirnya akan membantu badan usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Dalam skripsi ini pemeriksaan operasional dilakukan pada PT "S" yang bergerak di bidang industri kayu lapis. Pelaksanaan pemeriksaan operasional ini dibuat dalam tiga tahap yaitu: tahap pendahuluan, tahap pemeriksaan mendalam dan tahap pelaporan. Tahap pendahuluan bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada dalam badan usaha dengan cara mengumpulkan informasi. Tahap pemeriksaan mendalam bertujuan untuk menganalisa lebih lanjut permasalahan yang tampaknya memerlukan penanganan yang serius. Tahap pelaporan bertujuan untuk melaporkan temuan-temuan yang didapat dari pelaksanaan pemeriksaan operasional. Dalam pemeriksaan mendalam, diperoleh temuan-temuan yaitu: tidak adanya otorisasi surat order pembelian oleh pihak yang berwenang, masih adanya perangkapan fungsi antara bagian penerimaan bahan baku, dan juga bagian personalia dengan bagian pembelian bahan baku, tidak adanya kartu sediaan bahan baku, belum adanya perencanaan kebutuhan bahan baku, tidak adanya kartu sediaan barang jadi yang ada di kantor, lemahnya prosedur pengeluaran bahan baku dari gudang bahan baku ke pabrik, belum adanya pola perencanaan dan penjadwalan produksi, lemahnya prosedur penerimaan barang jadi dari pabrik ke gudang barang jadi. Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa badan usaha perlu meninjau kembali pelaksanaan sistem pengendalian internal atas fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi produksi. Karena berbagai kelemahan yang terjadi akan menimbulkan penyelewengan serta kurangnya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional bagi badan usaha.